

BAB IV

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai strategi jaringan advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam tata kelola ekstraktif nikel di Morowali Utara melalui implementasi Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), ditemukan simpulan antara lain:

1. Strategi advokasi yang dilakukan oleh PWYP Indonesia dalam tata kelola kegiatan ekstraksi nikel di Morowali Utara menggunakan empat pendekatan utama yaitu melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), publikasi laporan berkala, pemanfaatan platform multi-stakeholder dan kerja sama internasional serta pemantauan kepatuhan terhadap standar EITI. Keterlibatan multi-stakeholder group EITI Indonesia telah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil, namun tuntutan yang disuarakan oleh komunitas lokal belum selalu diakomodasi dengan baik oleh pemerintah dan korporasi tanpa diikuti dengan aksi nyata untuk mitigasi dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Implementasi EITI di Indonesia dalam konteks industri nikel di Morowali Utara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya alam. Melalui mekanisme rekonsiliasi data antara perusahaan dan pemerintah yang dilakukan oleh administrator independen, masyarakat dapat mengakses informasi yang sebelumnya tidak tersedia untuk publik. Namun demikian, implementasi ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal

terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, overlapping kebijakan pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan tambang nikel

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran berupa:

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi dalam industri nikel dalam penerbitan izin dari korporasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan, khususnya di tingkat daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih jelas dan sumber daya yang memadai kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan monitoring dan enforcement terhadap perusahaan tambang.
2. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat yang bersifat formal berupa konsultasi publik yang seringkali menjadi formalitas belaka, dan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara substantif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan hilirisasi nikel sejalan dengan komitmen Indonesia dalam melaksanakan energi yang berkeadilan.